

ABSTRAK

Amanda Nurmalia Anggraini, NIM 12101183102, Jual Beli Reksadana Pada Aplikasi Reksadana Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995 Dan Hukum Ekonomi Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, 2024, Pembimbing: Dr. Budi Kolistiawan, M.E.I

Kata Kunci: *Jual Beli, Reksadana, Undang-Undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995. Hukum Ekonomi Syariah*

Penelitian ini dilatar belakangi oleh salah satu alternatif investasi yang populer di Indonesia yaitu Reksadana. Terutama dengan adanya perkembangan teknologi dan ekonomi, reksadana Pada Aplikasi Bibit menjadi salah satu cara yang digunakan untuk melakukan transaksi investasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana mekanisme jual beli reksadana pada Aplikasi Bibit, serta tinjauan undang-undang No.8 Tahun 1995 dan hukum ekonomi syariah terhadap jual beli reksadana pada Aplikasi Bibit..

Adapun rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini ialah; 1) Bagaimana praktik jual beli reksadana pada Aplikasi Bibit? 2) Bagaimana jual beli reksadana pada Aplikasi Bibit ditinjau Undang-undang Pasar modal No. 8 tahun 1995? 2) Bagaimana jual beli reksadana pada Aplikasi Bibit ditinjau Hukum Ekonomi Syariah?

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan jenis penelitian deskriptif. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan. Pengumpulan data dengan menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Sedangkan untuk menganalisis data, peneliti menggunakan analisis reduksi data, penyajian data dan verifikasi.

Hasil dari penelitian yang diperoleh ialah: 1) Transaksi jual beli Reksadana pada Aplikasi Bibit secara online dengan cara yang mudah dan cepat. Pengguna dapat memilih berbagai jenis reksadana yang tersedia sesuai dengan profil risiko dan tujuan investasi mereka. Prosesnya dimulai dari pembuatan akun, pengisian profil risiko, pemilihan reksadana, hingga proses transaksi yang dilakukan melalui aplikasi dengan berbagai metode pembayaran yang disediakan. Aplikasi Bibit juga menyediakan informasi terperinci mengenai kinerja reksadana, alokasi portofolio, serta laporan investasi untuk memudahkan pengambilan keputusan investasi oleh pengguna. 2) Berdasarkan perspektif Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM) memberikan landasan hukum utama bagi regulasi reksa dana di Indonesia. Undang-undang ini mengatur berbagai aspek terkait pembentukan, operasional, dan pengawasan reksa dana. Selain UUPM, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga pengawas pasar modal di Indonesia juga mengeluarkan berbagai peraturan tambahan yang mengatur lebih lanjut tentang reksa dana, termasuk dalam konteks transaksi secara *online*. OJK menerbitkan peraturan-peraturan ini untuk memastikan bahwa transaksi reksa dana yang dilakukan melalui aplikasi tersebut tetap berada dalam hukum yang jelas dan aman bagi investor. 3) Berdasarkan perspektif Hukum Ekonomi Syariah, transaksi jual beli Reksadana pada aplikasi Bibit sesuai dengan rukun dan syarat akad mudharabah dan akad

wakalah. Akad mudharabah di mana investor memberikan uangnya ke perusahaan yang dipilih untuk membeli reksa dana sudah sesuai dengan prinsip syariah. Selain itu, akad wakalah juga diterapkan dimana investor menginvestasikan hartanya melalui manajer investasi berdasarkan rukun, syarat, dan fatwa yang berlaku, pelaksanaan Investasi Reksadana melalui Aplikasi Bibit sesuai dengan ketentuan syariat Islam pada produk reksadana syariah. Namun, untuk produk konvensional, masih terdapat ketidaksesuaian pada bagian akad, pengelolaan, dan penyaluran dana sehingga belum memenuhi ketentuan syariat Islam.. Pada produk reksadana konvensional, ada kekhawatiran bahwa penyaluran dana investasi dilakukan pada perusahaan yang latar belakangnya tidak sesuai dengan syariat Islam. Meskipun keuntungan reksadana konvensional lebih besar dibandingkan dengan reksadana syariah, ada beberapa aspek yang masih dianggap belum memenuhi ketentuan syariat Islam. seperti halnya pada produk Konvensional dalam pembagian keuntungan antara pemodal dan manajer investasi berdasarkan perkembangan suku bunga. Sedangkan pada produk Syariah Pembagian keuntungan antara pemodal dan manajer investasi berdasarkan proporsi yang telah ditentukan.

ABSTRACT

Amanda Nurmala Anggraini, NIM 12101183102, Buying and Selling Mutual Funds in Mutual Fund Applications Reviewed Based on Capital Market Law No. 8 of 1995 and Sharia Economic Law, Sharia Economic Law Study Program, Sayyid Ali Rahmatullah State University Tulungagung, 2024, Supervisor: Dr. Budi Kolistiawan, M.E.I

Keywords: Buying and Selling, Mutual Funds, Capital Markets Law no. 8 of 1995. Sharia Economic Law

This research is motivated by one of the popular investment alternatives in Indonesia, namely mutual funds. Especially with technological and economic developments, mutual funds on the Bibit Application have become one of the methods used to carry out investment transactions. The purpose of this research is to find out the mechanism for buying and selling mutual funds on the Bibit Application, as well as reviewing Law No. 8 of 1995 and sharia economic law on buying and selling mutual funds on the Bibit Application.

The problem formulation raised in this research is; 1) What is the practice of buying and selling mutual funds on the Bibit Application? 2) How the buying and selling of mutual funds on the Bibit Application is reviewed by Capital Markets Law No. 8 in 1995? 2) How is buying and selling mutual funds on the Bibit Application reviewed by Sharia Economic Law?

This research uses qualitative research methods and descriptive research types. This research is field research. Data collection using interview and documentation methods. Meanwhile, to analyze the data, researchers used data reduction analysis, data presentation and verification.

The results of the research obtained are: 1) Mutual fund buying and selling transactions on the Bibit Application online in an easy and fast way. Users can choose from various types of mutual funds available according to their risk profile and investment objectives. The process starts from creating an account, filling in the risk profile, selecting mutual funds, to processing transactions carried out through the application with various payment methods provided. The Bibit application also provides detailed information regarding mutual fund performance, portfolio allocation, and investment reports to facilitate investment decision making by users. 2) Based on the perspective of Law no. 8 of 1995 concerning Capital Markets (UUPM) provides the main legal basis for mutual fund regulation in Indonesia. This law regulates various aspects related to the formation, operation and supervision of mutual funds. Apart from the UUPM, the Financial Services Authority (OJK) as the capital market supervisory institution in Indonesia has also issued various additional regulations that further regulate mutual funds, including in the context of online transactions. OJK issues these regulations to ensure that mutual fund transactions carried out through the application remain within clear

laws and are safe for investors. 3) Based on the perspective of Sharia Economic Law, mutual fund buying and selling transactions on the Bibit application are in accordance with the pillars and terms of mudharabah and wakalah contracts. The mudharabah agreement in which investors give their money to the chosen company to buy mutual funds is in accordance with sharia principles. Apart from that, the wakalah contract is also implemented where investors invest their assets through an investment manager based on the applicable pillars, conditions and fatwas, the implementation of Mutual Fund Investments through the Bibit Application is in accordance with the provisions of Islamic law on sharia mutual fund products. However, for conventional products, there are still discrepancies in the contracts, management and distribution of funds so that they do not comply with the provisions of Islamic law. In conventional mutual fund products, there are concerns that investment funds are distributed to companies whose background is not in accordance with Islamic law. Even though the profits from conventional mutual funds are greater than those from sharia mutual funds, there are several aspects that are still considered not to meet the provisions of Islamic sharia. as is the case with conventional products in the distribution of profits between investors and investment managers based on developments in interest rates. Meanwhile, in Sharia products, profit sharing between investors and investment managers is based on predetermined proportions.

خلاصة

أماندا نورمالا أنغريني، نيم ٢٠١٣٨١١٠١٢١، شراء وبيع صناديق الاستثمار المشتركة في تطبيقات صناديق الاستثمار المشتركة التي تمت مراجعتها بناءً على قانون سوق رأس المال رقم ٨ لسنة ١٩٩١ والقانون الاقتصادي الشرعي، برنامج دراسة القانون الاقتصادي الشرعي، جامعة السيد علي رحمة الله الحكومية تولونج أجونج، ٤٢٠٢، المشرف: د. بودي كوليسيتيوان، م.او.اي

الكلمات المفتاحية: البيع والشراء، صناديق الاستثمار، قانون أسواق رأس المال رقم ٠١. قانون رقم ٨ لسنة ١٩٩١. قانون الاقتصاد الشرعي

الدافع وراء هذا البحث هو أحد البدائل الاستثمارية الشائعة في إندونيسيا، وهي صناديق الاستثمار المشتركة. وخاصة مع التطورات التكنولوجية والاقتصادية، أصبحت صناديق الاستثمار المشتركة على تطبيق بذور إحدى الطرق المستخدمة لتنفيذ المعاملات الاستثمارية. ويهدف هذا البحث إلى معرفة آلية بيع وشراء صناديق الاستثمار على تطبيق بذور، بالإضافة إلى مراجعة القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩١ والقانون الاقتصادي الشرعي في شأن بيع وشراء صناديق الاستثمار على تطبيق بذور.

صياغة المشكلة المطروحة في هذا البحث هي؛ (١) ما هي ممارسة شراء وبيع صناديق الاستثمار المشتركة على تطبيق بذور؟ (٢) كيف تتم مراجعة شراء وبيع صناديق الاستثمار المشتركة على تطبيق بذور بموجب قانون أسواق رأس المال رقم ٠١. لسنة ١٩٩١. ٨ في عام ١٩٩١؟ (٣) كيف تتم مراجعة شراء وبيع صناديق الاستثمار المشتركة على تطبيق بذور بموجب القانون الاقتصادي الشرعي؟

يستخدم هذا البحث أساليب البحث النوعي وأنواع البحث الوصفي. وهذا البحث هو بحث ميداني. جمع البيانات باستخدام أساليب المقابلة والتوثيق. وفي الوقت نفسه، لتحليل البيانات، استخدم الباحثون تحليل تقليل البيانات وعرض البيانات والتحقق منها.

نتائج البحث التي تم الحصول عليها هي: (١) معاملات البيع والشراء لصناديق الاستثمار المشتركة على تطبيق بذور عبر الإنترنت بطريقة سهلة وسريعة. يمكن للمستخدمين الاختيار من بين أنواع مختلفة من صناديق الاستثمار المتاحة وفقاً لملف المخاطر والأهداف الاستثمارية الخاصة بهم. تبدأ العملية من إنشاء حساب، وملء ملف تعريف المخاطر، واختيار صناديق الاستثمار المشتركة، إلى معالجة المعاملات التي تتم من خلال التطبيق باستخدام طرق الدفع المختلفة المتوفرة. يوفر تطبيق بذور أيضاً معلومات مفصلة بشأن أداء صناديق الاستثمار المشتركة، وتخصيص المحفظة، وتقارير الاستثمار لتسهيل اتخاذ القرارات الاستثمارية من قبل المستخدمين. (٢) بناءً على منظور القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩١ بشأن أسواق رأس المال (اووqm) الأساس القانوني الرئيسي لتنظيم صناديق الاستثمار المشتركة في إندونيسيا وينظم هذا القانون الجوانب المختلفة المتعلقة بتكوين صناديق الاستثمار وتشغيلها والإشراف عليها. وبصرف النظر عن اووqm، أصدرت هيئة الخدمات المالية (ايبك) باعتبارها المؤسسة الإشرافية على سوق رأس المال في إندونيسيا أيضاً العديد من اللوائح الإضافية التي تنظم صناديق الاستثمار المشتركة، بما في ذلك في سياق المعاملات عبر الإنترنت. تصدر ايبك هذه اللوائح للتأكد من أن معاملات صناديق الاستثمار المشتركة التي يتم تنفيذها من خلال التطبيق تظل ضمن قوانين واضحة وأمنة للمستثمرين. (٣) بناءً على منظور القانون الاقتصادي الشرعي، فإن معاملات البيع والشراء في صناديق الاستثمار المشتركة عبر تطبيق بذور تتوافق مع أركان وشروط عقود المضاربة والوكالة. إن اتفاقية المضاربة التي بموجبها يقوم المستثمرون بإعطاء أموالهم للشركة المختارة لشراء صناديق الاستثمار المشتركة تتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية. علاوة على ذلك، يتم تنفيذ عقد الوكالة أيضاً حيث يستثمر المستثمرون أصولهم من خلال مدير استثمار بناءً على الأركان والشروط والفتاوى المعمول بها، ويكون تنفيذ استثمارات صناديق الاستثمار المشتركة من خلال تطبيق بذور متوافقاً مع أحكام الشريعة الإسلامية. منتجات صناديق الاستثمار المشتركة. ومع ذلك، بالنسبة للمنتجات التقليدية، لا تزال هناك تناقضات في العقود وإدارة وتوزيع الأموال بحيث لا تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. وفي منتجات صناديق الاستثمار التقليدية، هناك مخاوف من توزيع أموال الاستثمار على

الشركات التي لها خلفية ولا يتوافق مع الشريعة الإسلامية .على الرغم من أن أرباح صناديق الاستثمار التقليدية أكبر من أرباح صناديق الاستثمار المشتركة المتوافقة مع الشريعة، إلا أن هناك جوانب عديدة لا تزال تعتبر غير مستوفية لأحكام الشريعة الإسلامية .كما هو الحال مع المنتجات التقليدية في توزيع الأرباح بين المستثمرين ومديري الاستثمار بناء على التطورات في أسعار الفائدة .وفي الوقت نفسه، في المنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، يتم تقاسم الأرباح بين المستثمرين ومديري الاستثمار على أساس نسب محددة سلفاً